

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

untuk triwulan IV, angka proxy inflasi kabupaten seram bagian barat mengikuti tren inflasi maluku sebesar 2.30% dengan Indeks Perubahan Harga 109,62.

Proxy Inflasi/ IPH Kabupaten Seram Bagian Barat Bulan Oktober menunjukkan terjadinya penurunan harga atau deflasi untuk komoditas andil penyumbang deflasi sebagai berikut

Oktober	M1 -1.06	BAWANG MERAH(-0.7682), CABAI RAWIT(-0.2801), CABAI MERAH(-0.17)
	M2 -1.2	BAWANG MERAH(-0.7682), CABAI RAWIT(-0.4277), CABAI MERAH(-0.17)
	M3 -1.23	BAWANG MERAH(-0.7682), CABAI RAWIT(-0.4599), CABAI MERAH(-0.17)
	M4 -1.3	BAWANG MERAH(-0,7682), CABAI RAWIT(-0,4553), CABAI MERAH(-0,1999)
	M5 -1.52	BAWANG MERAH(-0,7682), CABAI RAWIT(-0,5203), CABAI MERAH(-0,2655)

Proxy Inflasi/ IPH Kabupaten Seram Bagian Barat Bulan November menunjukkan terjadinya penurunan harga atau deflasi untuk komoditas andil penyumbang deflasi sebagai berikut

November	M1-0.91	Telur Ayam Ras(-0,3036), Cabai Rawit(-0,2707), Cabai Merah(-0,2424)
	M2-0.96	Cabai Merah(-0,3271), Telur Ayam Ras(-0,3036), Cabai Rawit(-0,2802)
	M3-0.78	CABAI MERAH(-0.3271), TELUR AYAM RAS(-0.3036), CABAI RAWIT(-0.2312)
	M4	

data IPH atau Proxy Inflasi Kabupaten Seram Bagian Barat pada bulan Desember 2025 tidak tersedia oleh BPS namun menurut pemantauan harga kebutuhan pokok oleh Tim TPID Kab. SBB tidak terjadi perubahan harga kebutuhan pokok yang signifikan atas

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

#### 1. Permasalahan dari Sisi Pasokan (Supply Side)

##### a. Ketergantungan Pasokan dari Luar Daerah

- Kabupaten SBB **belum sepenuhnya mandiri dalam pemenuhan pangan strategis** (beras, gula, minyak goreng, daging ayam, telur).
- Sebagian besar kebutuhan dipasok dari **luar kabupaten bahkan luar provinsi**, sehingga harga sangat sensitif terhadap:
  - Kenaikan harga di daerah pemasok
  - Gangguan distribusi dan transportasi laut

## b. Produksi Pangan Lokal Belum Stabil

- Produksi pangan lokal (hortikultura, pangan segar) masih **bersifat musiman dan skala kecil**.
- Ketergantungan pada faktor cuaca dan minimnya teknologi pascapanen menyebabkan:
  - Fluktuasi pasokan
  - Kehilangan hasil (post-harvest loss)

**Dampak:** Komoditas volatile food (cabai, bawang, sayur) sering memicu inflasi.

---

## 2. Permasalahan Distribusi dan Logistik

### a. Biaya Transportasi Relatif Tinggi

- Karakteristik SBB sebagai wilayah kepulauan menyebabkan:
  - Biaya angkut laut dan darat tinggi
  - Ketergantungan pada cuaca dan jadwal transportasi

**Dampak:** Harga barang kebutuhan pokok di tingkat konsumen menjadi lebih mahal dan mudah bergejolak.

### b. Keterbatasan Infrastruktur Distribusi

- Ketersediaan:
  - Gudang penyimpanan
  - Cold storage
  - Pasar induk/pusat distribusi masih terbatas.

**Dampak:** Pasokan tidak bisa distabilkan saat terjadi lonjakan permintaan (HBKN).

---

### 3. Permasalahan dari Sisi Permintaan (Demand Side)

#### a. Lonjakan Permintaan Musiman

- Pada **hari besar keagamaan nasional (HBKN)** dan akhir tahun:
  - Permintaan pangan dan jasa meningkat tajam
  - Tidak selalu diimbangi pasokan yang cukup

**Dampak:** Tekanan inflasi musiman, terutama pada bahan pangan dan jasa konsumsi.

---

#### b. Pola Konsumsi Rumah Tangga

- Konsumsi masyarakat masih **terkonsentrasi pada beberapa komoditas pokok**, sehingga gejolak harga komoditas tersebut langsung berdampak besar pada inflasi daerah.
- 

### 4. Permasalahan Harga Barang dan Jasa (Administered Prices & Core Inflation)

#### a. Sensitivitas terhadap Penyesuaian Tarif

- Penyesuaian harga/tarif:
  - Transportasi
  - Listrik, air
  - Jasa pendidikan dan kesehatan

➔ **Dampak:** Inflasi inti (core inflation) meningkat meski pasokan pangan relatif stabil.

---

#### b. Kenaikan Biaya Jasa Lokal

Keterbatasan tenaga kerja terampil dan biaya operasional mendorong **kenaikan harga jasa** (transportasi lokal, jasa perawatan, jasa pribadi).

---

## 5. Permasalahan Kelembagaan dan Koordinasi

### a. Keterbatasan Data Harga Tingkat Kabupaten

- **Data inflasi/IHK SBB belum tersedia secara rutin dan detail** seperti kota IHK.
- Pemantauan harga masih mengandalkan:
  - Survei terbatas
  - Data provinsi sebagai proksi

➔ **Dampak:** Respons kebijakan pengendalian inflasi belum sepenuhnya berbasis data real-time.

---

### b. Optimalisasi TPID Belum Maksimal

- Koordinasi TPID lintas OPD dan lintas wilayah masih dapat diperkuat, khususnya dalam:
    - Early warning system
    - Kerja sama antar daerah pemasok
    - Operasi pasar yang lebih terjadwal
- 

## 6. Permasalahan Eksternal dan Risiko Ke Depan

### a. Faktor Cuaca dan Perubahan Iklim

- Cuaca ekstrem mengganggu:
  - Produksi pertanian

◦

Distribusi laut

**Risiko:** Kenaikan harga pangan secara tiba-tiba.

---

b. Transmisi Inflasi Nasional dan Global

- Kenaikan harga nasional (beras, BBM, pangan impor) dan faktor global:
  - Harga energi
  - Gangguan rantai pasok

**Risiko:** Inflasi daerah meningkat meskipun permintaan lokal relatif stabil.

---

**Permasalahan kunci pengendalian inflasi di Kabupaten SBB meliputi:**

1. Ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah
  2. Biaya distribusi dan logistik yang tinggi
  3. Produksi pangan lokal yang belum stabil
  4. Lonjakan permintaan musiman (HBKN)
3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Seram Bagian Barat dilaksanakan secara terkoordinasi melalui **Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)** dengan mengacu pada **strategi nasional 4K**, yaitu *keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif*.

- Pemerintah Kabupaten SBB telah membentuk dan mengaktifkan **TPID Kabupaten** yang melibatkan perangkat daerah terkait, instansi vertikal, serta pemangku kepentingan lainnya.

▪

TPID secara berkala melakukan:

- Rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah
- Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah
- Evaluasi perkembangan harga komoditas strategis
  - **Penguatan produksi pangan lokal**, terutama komoditas hortikultura dan pangan segar, melalui:
    - Dukungan sarana dan prasarana pertanian
    - Pendampingan petani dan kelompok tani
  - Mendorong pemanfaatan lahan pertanian lokal dan pekarangan sebagai sumber pangan alternatif.

Dalam rangka menjamin ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok dan penting, Pemerintah Kabupaten SBB melaksanakan langkah-langkah berikut:

▪

---

#### Pengendalian Harga dan Keterjangkauan

Untuk menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat, kebijakan yang telah dilaksanakan antara lain:

- **Pemantauan harga secara rutin** di pasar tradisional dan titik distribusi utama.
- **Pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah**, terutama menjelang dan selama Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
- Koordinasi dengan pelaku usaha dan distributor untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan.
- Pengawasan terhadap potensi praktik penimbunan dan spekulasi harga.

---

#### Menjaga Kelancaran Distribusi

◦

Pemerintah Kabupaten SBB berupaya menjaga kelancaran distribusi barang melalui:

- Koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan **kelancaran transportasi laut dan darat**, terutama pada kondisi cuaca yang berpotensi mengganggu distribusi.
- Penguatan peran pelaku distribusi lokal agar rantai pasok lebih efisien dan tidak terputus.

---

#### Komunikasi Efektif dan Edukasi Publik

Dalam rangka menjaga ekspektasi inflasi masyarakat, Pemerintah Kabupaten SBB melakukan:

- Edukasi kepada masyarakat terkait:
  - Pola konsumsi bijak
  - Pemanfaatan pangan lokal

- 

---

■

#### 4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Seram Bagian Barat dilaksanakan melalui koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan mengacu pada kerangka **4K (Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif)**. Secara umum, kebijakan yang dilaksanakan telah membantu menjaga stabilitas harga, namun efektivitasnya masih menghadapi sejumlah keterbatasan struktural dan operasional.

- Harga barang kebutuhan pokok dan penting secara umum **masih dapat dikendalikan**, terutama di luar periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
- Gejolak harga yang terjadi cenderung bersifat **sementara dan musiman**, serta dapat dikendalikan melalui intervensi pemerintah daerah seperti pasar murah dan operasi pasar.

TPID Kabupaten SBB telah aktif melakukan koordinasi lintas perangkat daerah dan instansi terkait.

- Koordinasi dengan TPID Provinsi Maluku dan pemerintah pusat telah mendukung sinkronisasi kebijakan pengendalian inflasi daerah.
- TPID Kabupaten SBB telah aktif melakukan koordinasi lintas perangkat daerah dan instansi terkait.
- Koordinasi dengan TPID Provinsi Maluku dan pemerintah pusat telah mendukung sinkronisasi kebijakan pengendalian inflasi daerah.

#### 5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Mengintensifkan **pemantauan harga harian/mingguan** pada komoditas strategis (beras, cabai, bawang, daging ayam, telur, minyak goreng).
- Melaksanakan **pasar murah dan operasi pasar** secara lebih terencana, khususnya menjelang dan selama Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
- Memperkuat koordinasi dengan distributor dan pedagang utama untuk mencegah lonjakan harga yang tidak wajar dan praktik penimbunan.
- Menyusun **peta jalur distribusi pangan utama** di wilayah SBB sebagai dasar intervensi cepat saat terjadi gangguan pasokan.
- Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan kelancaran transportasi laut dan darat, terutama pada musim cuaca ekstrem.
- Fasilitasi distribusi langsung dari daerah pemasok ke pasar-pasar utama untuk menekan biaya rantai pasok
- 
-